

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMPN 3 KOTA KEDIRI

**Ristikawati¹⁾, Suwarno²⁾, Teguh Pramono³⁾*

1),2),3) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

**Email Korespondensi: ristikawati190576@gmail.com*

Submitted: 13-12-2023 | Accepted: 27-05-2024 | Published: 28-05-2024

<p>Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Sistem Zonasi; Sekolah.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi padangan aktor dalam pengelolaan sekolah yang berkepentingan pada Peraturan Walikota Kediri No. 23 Tahun 2021 tentang Penerimaan Siswa Baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Kediri dan. Penelitian ini nantinya juga akan memperlihatkan proses implementasi kebijakan system zonasi di SMP Negeri 3 Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sementara itu, kedalaman temuan dilakukan dengan metode studi kasus karena peneliti sendiri merupakan bagian dari aktor yang diteliti karena bagian dari SMP Negeri 3 Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi berjalan dengan baik, namun yang menjadi fokus perbaikan adalah Sumberdaya. Hal ini dikarenakan meskipun sebagian besar yang tergabung dalam kepantiaan PPDB sistem ZONASI sudah menguasai IT, namun kendala jaringan internet dan sarana pendukung lainnya belum mencukupi. Solusi, yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya menyiapkan SDM serta penyusunan program sekolah.</p>
<p>Keywords: Policy Implementation; Zonation System; School</p>	<p>Abstract</p> <p><i>This research aims to explore the views of actors in school management who have an interest in Kediri Mayor Regulation no. 23 of 2021 concerning New Student Admissions (PPDB) at Public Elementary School of Kediri City. This research will also show the process of implementing the zoning system policy at Public Elementary School of Kediri City Kediri. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Meanwhile, the depth of the findings was carried out using the case study method because the researcher himself was part of the actors studied because he was part of Public Elementary School of Kediri City. The research results show that the implementation process is going well, but the focus of improvement is resources. This is because even though most of those who are members of the PPDB ZONATION system committee have mastered IT, the internet network and other supporting facilities are not sufficient. Solutions that can be used to overcome this problem include</i></p>

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berpendidikan. Kalimat ini mengandung makna bahwa Pendidikan menjadi bagian penting dalam kehidupan warga negara di Indonesia (Santika, 2021). Pemerintah Negara Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan bangsa dimulai dari dasar fundamental negara yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, serta terkandung dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan (Yudistira, 2014). Proses pelaksanaan Pendidikan yang tertuang dalam dasar fundamental tersebut yaitu bertujuan untuk meningkatkan moral bangsa dan mencerdaskan masyarakat agar menjadi lebih baik dan memiliki martabat dimata dunia. Dapat dikatakan Pendidikan merupakan hal terpenting untuk menempatkan pembangunan prioritas pemerintah bangsa Indonesia.

Segala macam upaya untuk pemeratakan Pendidikan di Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah adanya Bantian Operasional Sekolah (BOS) wajib belajar 12 tahun. Program BOS ini merupakan pengganti kurikulum yang sesuai dengan perubahan jaman (Rozak & Az-Ziyadah, 2021).

Salah satu cara meningkatkan mutu Pendidikan di sekolah adalah pembaruan system Pendidikan (Baro'ah, 2020) hal ini dilakukan agar terciptanya pemerataan pendidikan. Berkaitan dengan pembaruan system, sudah dilakukan dalam beberapa langkah salah satunya adalah system zonasi (Pradewi & Rukiyati, 2019). Sistem Zonasi diberlakukan dimulai dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB (Syakarofath et al., 2020). PPDB merupakan mekanisme dalam penyelenggaraan manajemen Pendidikan sebelum dimulainya tahun ajaran yang baru juga dapat dikatakan sebagai penentu diterimanya calon peserta didik baru (Bintoro, 2018). Adapun sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 bahwa infrastruktur penunjang sekolah perlu menjadi perhatian khusus Ketika menyambut PPDB. Namun kebijakan ini seringkali

diabaikan akibat dari pergantian kepemimpinan pada pemerintah pusat yang akhirnya berpengaruh terhadap mutu Pendidikan di sekolah (Hasbi et al., 2021).

Kebijakan tentang zonasi yang tertuang dalam permendikbud tersebut lambat laun akan menimbulkan pro dan kontra pada setiap pihak yang berkepentingan (Ula & Lestari, 2020) (Andina, 2017). Namun dengan diterapkannya system zonasi ini akan menjadi fokus dalam penelitian ini dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 3 Kota Kediri”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sebagaimana yang dikutip oleh (Moleong, 2017) menyatakan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk meneliti permasalahan yang muncul dilapangan berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pandangan *stakeholder* tentang Peraturan Walikota Kediri nomor 23 tahun 2021 tentang PPDB di SMP Negeri 3 Kediri dan penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana proses implementasi kebijakan zonasi yang dilakukan di sekolah tersebut. Peneliti akan menggali lebih dalam perspektif aktor yang berkepentingan dengan cara menggali data tentang gambaran sebenarnya penerapan system Zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Kediri yang akan disajikan dalam hasil penelitian. Adapun teori yang dipakai untuk menganalisis fenomena PPDB di SMP Negeri 3 Kota Kediri, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari (EDWARD III, 1980) yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penelitian ini cocok menggunakan perspektif kualitatif karena menurut (Sugiono, 2016) adalah pendekatan deskriptif dimana data ini menghasilkan data berupa kutipan wawancara tertulis atau lisan dari narasumber yang diamati. Sementara itu penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus menurut (Usriyah et al., 2020) adalah penelitian yang mengutamakan karakteristik dengan mengedepankan latar belakang dan kondisi terkini serta peneliti berinteraksi langsung dengan lingkungan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Proses mengenai sosialisasi PPDB ini sudah dilakukan dengan cara memberikan pengumuman secara *online*. Pengumuman tersebut disajikan langsung melalui *website* SMP Negeri 3 Kota Kediri. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan salah satu informan yaitu Wakil Kepala Sekolah berikut ini:

“Bahwa pengumuman dan informasi PPDB Sistem Zonasi ini bisa di akses melalui WEB SMPN 3 Kediri atau datang langsung ke sekolah. Apabila nama siswa pada hari pertama ada didaftar online webside PPDB dan pada hari berikutnya namanya tidak ada itu berarti anak tersebut diterima disekolah yang dipilihnya. Untuk proses sosialisasinya itu kemarin ada yang lewat online yang dari Dinas Pendidikan maupun dari Web SMP N 3 Kediri dan di sekolah sendiri ditempel di papan pengumuman.” Ikhamdulillah semua berjalan baik dan lancar. Untuk alur pendaftaran ada dipapan pengumuman. Setelah pengumuman pendaftaran, mengunduh formulir di WEB SIAP PPDB, mengisi formulir. Mengumpulkan formulir sambil menyertakan berkasnya masuk ke tim verifikasi data.”

Dalam hal ini kepala sekolah dapat dikatakan baik dalam menyampaikan informasi. Hal itu terbukti dari pemberian intruksi kepada staf dan guru yang dapat dipahami sehingga staf dapat menjalankan intruksi tersebut dengan baik seperti memberikan pengumuman tentang PPDB di SMP Negeri 3 Kediri. Hal tersebut diungkapkan dalam salah satu staf tenaga ahli IT pada kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau sosialisasi di PPDB online itu sudah diberikan. Kemudian kami juga menempel di papan pengumuman. Kami siapkan ruang khusus humas biasanya standby disitu untuk memberikan informasi yang diperlukan. Kita sosialisasinya melalui medsos juga pengumuman yang ditempel, serta melayani informasi face to face (offline) tetap kita layani. Karena banyak orang tua yang bingung cara mendaftarnya. Sementara itu PPDB tahun 2021 yang berdasarkan sistem Zonasi pengumumannya dipampang di depan sekolahan berupa baliho besar dan juga melalui media sosial”

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah dalam proses komunikasi kebijakan PPDB di SMP Negeri 3 Kediri. Hal tersebut terlihat dari sosialisasi yang memanfaatkan media *online* maupun *offline*. Selain itu, pimpinan di SMP Negeri 2 Kediri juga sudah menjalankan intruksi dengan baik, secara horizontal maupun vertical.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud oleh (EDWARD III, 1980) bukan hanya soal manusia namun juga non manusia. Sumber daya non manusia mencakup system jaringan, computer, internet dan lainnya untuk menunjang terlaksananya implementasi

kebijakan PPDB. SMP Negeri 3 Kediri menyediakan laboratorium komputer di lengkapi dengan jaringan internet, untuk PPDB sistem ZONASI meskipun kadang *trouble* karena banyak yang mengakses untuk pendaftaran PPDB sistem ZONASI. Hal tersebut diperkuat dengan kutipan wawancara dengan salah satu staf IT di SMP Negeri 3 Kota Kediri yang sekaligus tergabung dalam panitia PPDB berikut ini:

“Kita selalu mengembangkan E-Learning dalam pembelajaran berbasis internet, bagi peserta didik yang tidak punya sarana untuk pembelajaran online bisa ke lab TIK untuk pelajaran TIK semua siswa bisa langsung ke LAB TIK. Selain itu, Sebagian besar yang tergabung dalam kepanitiaan PPDB sistem ZONASI sudah menguasai IT, sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak mengalami hambatan. Bahwa sekolah juga menyediakan internet untuk proses belajar dan mengajar, meskipun kadang trouble karena banyak yang mengaksesnya.”

Berkaitan dengan sumber daya, peneliti juga melakukan konfirmasi dengan salah satu narasumber yang berperan sebagai guru di SMP Negeri 3 Kediri. Adapun dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa guru di SMP Negeri 3 diberikan wewenang sepenuhnya untuk mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang system zonasi. Hal ini digunakan sebagai metode pembelajaran salah satu mata pelajaran. Hal tersebut seperti yang dikutip dalam wawancara dengan salah satu guru berikut ini:

“Guru diberi kebebasan. Kebebasan ini dalam artian guru diberi kebebasan untuk melakukan berbagai macam metode mengajar untuk membantu siswa yang nilainya dibawah KKM itu. Sekarang kan inputnya yang heterogen itu kita menjadi berfikir bagaimana cara mengajar yang bisa membantu siswa. Bahwa dalam menghadapi siswa dari sistem zonasi ini guru diberi wewenang untuk melakukan pembelajaran dan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi pengetahuan siswa. metode belajar ini diberikan untuk membantu siswa dalam belajar. Selain itu sekolah memberikan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Fasilitas ini berupa tambahan pembelajaran setelah sekolah kepada siswa, perpustakaan dengan berbagai macam sumber belajar. Serta laboratorium untuk menunjang pembelajaran siswa. Fasilitas internet juga diberikan kepada siswa untuk membantu siswa dalam mencari referensi yang diperlukan”.

3. Disposisi

Pada dasarnya pelaksana kebijakan SMP Negeri 3 Kediri mendukung dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini. Hal tersebut dikutip dari wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Kediri berikut ini:

“Saya setuju dengan sistem zonasi itu karena harapannya memberi kesempatan anak-anak di wilayah itu mendapatkan kesempatan untuk berada di lingkungan sekolah sekitar rumahnya serta untuk mengurangi kemacetan di saat jam

berangkat dan pulang sekolah. Ini kan sebuah kebijakan dari pemerintah, kita harus mengikuti aturannya. Ini kan juga termasuk usaha pemerataan pendidikan”.

Sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk pemeratakan kualitas Pendidikan di Kediri pada khususnya dan bagi Indonesia pada umumnya. Sementara itu, disposisi ini adalah perintah langsung dari Kementerian Pendidikan dan didisposisikan pada Dinas Pendidikan di Kota Kediri. Hal tersebut merupakan bagian dari wujud pemerataan Pendidikan. Sehingga dapat memberi kesempatan bagi calon siswa warga Kota Kediri untuk tergabung dalam SMP Negeri 3 Kediri.

4. Struktur Birokrasi

Pada penerimaan siswa baru sistem ZONASI panitia yang dibentuk sudah sesuai dengan SOP yang ada dalam PPDB sistem ZONASI. Untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan mempermudah /memperlancar PPDB Sistem Zonasi ini di SMPN 3 Kediri telah dibentuk panitia PPDB Sistem Zonasi ini sesuai dengan juknis dari Dinas Pendidikan. Selain itu, panitia PPDB di SMP Negeri 3 Kediri telah memberikan *reward* berupa insentif bagi tenaga non PNS dan untuk tenaga PNS yang di include kan dalam tunjangan kerja. Selain itu, setiap panitia saling berkerjama jika terjadi masalah dengan cara mendiskusikan berdama dan mencari solusi yang terbaik untuk semua. Selain dibentuk tim PPDB, juga terdapat SOP untuk pelaksanaan PPDB. Dalam hal ini PPDB dibentuk dengan SK dan SOP nya. Selain itu terdapat juknis PPDB dari Dinas Pendidikan Kota Kediri. Penetapan panitia dan SOP dalam PPDB ini ditetapkan oleh Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Kediri.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP N 3 Kota Kediri sudah berjalan dengan baik dan lancar, implementasi kebijakan PPDB ini dipengaruhi oleh 1) Pengumuman PPDB di SMP Negeri 3 Kota Kediri lewat WEB, MEDSOS dan Papan pengumuman. 2) Kepanitiaan PPDB hampir semua sudah menguasai IT, sekolah juga menyiapkan jaringan internet. 3) PPDB Sistem ZONASI merupakan kebijakan dari pemerintah Daerah yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan. 4) Pelaksanaan PPDB di SMP N 3 Kota Kediri sesuai dengan SOP dan JUKNIS dari Dinas Pendidikan Kota Kediri.

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan memiliki empat aspek penting yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun untuk SMP Negeri 3 Kediri memiliki skala prioritas pada sekotro komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah sosialisasi kebijakan yang difokuskan kepada kelompok sasaran tertentu. Adapun tujuan dari kebijakan system zonasi ini adalah dapat dipahami secara jelas dan terperinci pada semua lapisan masyarakat, oleh karena itu kebijakan tersebut harus disampaikan dengan jelas melalui Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 3 Kota Kediri.

REFERENSI

- Andina, E. (2017). Sistem zonasi dan dampak psikososial bagi peserta didik. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 9(14), 9–12.
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063–1073.
- Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma tahun ajaran 2017/2018 di kota samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1), 48–57.
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hasbi, I., Fuadi, A., Nadeak, B., Arifudin, O., Juliastuti, J., Lestari, A. S., Utomo, W. T., Rianita, N. M., Fatmasari, R., & Pasaribu, E. (2021). *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktik)*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 4(1), 28–34.
- Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Alim| Journal of Islamic Education*, 3(2), 197–208.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Sugiono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115–130.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak sistem zonasi bagi sekolah menengah pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1), 10–18.
- Usriyah, N. N., Ayuningtyas, D. D., & Hardjati, S. (2020). Peran BUMD Dalam Meningkatkan Pad Surabaya (Studi Kasus Kebun Binatang Surabaya). *Jurnal*

Sosial Ekonomi Dan Politik, 1(2), 1–10.

Yudistira, C. (2014). *Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Alam Ungaran Kabupaten Semarang*. Universitas Negeri Semarang.